

# TRANSPARANSI

## PELUNCURAN CPI 2016

TERUS PERKUAT INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK,  
DORONG INTEGRITAS BISNIS SEKTOR SWASTA



Indonesia secara konsisten menunjukkan peningkatan dalam upaya pemberantasan korupsi di sektor publik. Konsistensi pembenahan di sektor publik tersebut tidak akan segera membuahkan hasil jika tidak dibarengi dengan langkah-langkah nyata semua pihak untuk mendorong penguatan integritas bisnis di dunia usaha/swasta. Pengalaman di berbagai negara menunjukkan bahwa, kombinasi strategi ini akan mempercepat terwujudnya pemerintahan yang bersih dan iklim usaha yang kondusif. Dengan demikian, diharapkan dua sampai empat tahun ke depan, Indonesia bisa segera duduk di anak tangga yang sejajar dengan negara-negara lain yang memiliki skor CPI sama atau di atas rerata regional dan global. Masuknya Indonesia ke dalam kelompok negara G20, juga harus dijadikan momentum pembenahan tersebut. Demikian temuan dan rekomendasi utama Transparency International (TI) dalam Corruption Perception Index (CPI) 2016 yang diluncurkan secara global hari ini.

"Skor Corruption Perception Index (CPI) Indonesia tahun 2016 meningkat tipis satu poin sebesar 37. Skor CPI berada pada rentang 0-100. 0 berarti negara dipersepsikan sangat korup, sementara skor 100 berarti dipersepsikan sangat bersih. Kenaikan skor ini menandakan masih berlanjutnya tren positif pemberantasan korupsi di Indonesia. Terhitung sejak 2012, skor CPI Indonesia meningkat lima poin dalam rentang waktu lima tahun." kata Dadang Trisasongko, Sekretaris Jenderal, Transparency International Indonesia.

"Peningkatan lima poin dalam rentang waktu lima tahun dinilai terlalu lambat untuk mencapai target 50 pada akhir 2016. Peningkatan skor CPI lambat karena pemberantasan korupsi selama ini hanya fokus pada sektor birokrasi saja. Reformasi birokrasi memang berkontribusi terhadap perbaikan integritas layanan publik dan menyumbang kenaikan skor CPI rata-



"Peningkatan lima poin dalam rentang waktu lima tahun dinilai terlalu lambat untuk mencapai target 50 pada akhir 2019. Reformasi birokrasi memang berkontribusi terhadap perbaikan integritas layanan publik dan menyumbang kenaikan skor CPI rata-rata 1 poin setiap tahun. Strategi pemberantasan korupsi nasional masih belum memberikan porsi besar terhadap korupsi politik, korupsi hukum, dan korupsi bisnis". - Dadang Trisasongko, Sekjen TI Indonesia



"Di tahun 2016, rerata skor CPI global tertahan di skor 43. Dari 176 negara yang dinilai sebanyak 60% negara (105 dari 176) memiliki skor di bawah rerata dunia atau terpatut selisih 3% dibandingkan tahun 2015. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 3% dari negara dunia yang telah melampaui skor rerata CPI global." papar Lia Toriana, Deputy Sekretaris Jenderal, Transparency International Indonesia.



### Peringkat dan Skor CPI 2016

Tahun (2005/2014)	Peringkat Regional (2005/2016)	Peringkat Global (2005/2016)	Negara
85/84	2/2	8/7	Singapura (Tidak Terak. Peringkat Saja)
75/8	7/8	7/81	Brunei (Tidak Terak. Peringkat Saja)
50/40	8/10	54/55	Malaysia (Tidak Terak. Peringkat Saja)
64/37	13/15	48/50	Indonesia (Tidak Terak. Peringkat Saja)
68/35	11/18	26/501	Thailand (Tidak Terak. Peringkat Saja)
61/35	14/18	65/501	Philippines (Tidak Terak. Peringkat Saja)
61/39	17/21	112/113	Vietnam (Tidak Terak. Peringkat Saja)
31/30	21/23	139/139	Laos (Tidak Terak. Peringkat Saja)
32/28	24/25	147/138	Myanmar (Tidak Terak. Peringkat Saja)
			Cambodia (Tidak Terak. Peringkat Saja)

Sumber: Corruption Perception Index 2016. 0 artinya sangat korup, 100 artinya sangat bersih.



dengan skor 32 (turun), dan Eropa Timur dan Asia Tengah juga dengan skor 34 (naik).

Indonesia: Skor Naik satu poin dan peringkat turun dua tingkat "Tahun 2016 ini, skor CPI Indonesia sebesar 37 dan menempati urutan 90 dari 176 negara yang diukur. Skor Indonesia naik 1 poin dan turun dua peringkat dari tahun sebelumnya. Kenaikan tipis skor CPI Indonesia hanya mampu menyialip Thailand (35, turun) yang selalu berada di atas Indonesia sejak 5 tahun terakhir. Kenaikan skor CPI ini belum mampu mengungguli Malaysia (49, turun), Brunei (58) dan Singapura (85, turun). Indonesia hanya sedikit lebih baik di atas Thailand (35, turun) dan Filipina (35, tetap), Vietnam (33, naik), dan Myanmar (28, naik), Kamboja (21, tetap)." papar Lia Toriana.

Rumus kenaikan skor CPI 2016 adalah 3-2-3. Artinya, 3 sumber data penyusun CPI yang mengalami kenaikan, 2 sumber mengalami stagnasi, dan 3 sumber mengalami penurunan. Peningkatan skor CPI 2016, disumbangkan oleh paket debirokratisasi (penyederhanaan layanan perizinan, perpajakan, bongkar muat, dll), pembentukan satgas antikorupsi lintas lembaga (Stranas PPK, Saber Pungli, dan reformasi hukum, dll) yang dinilai efektif menurunkan prevalensi korupsi.

CPI Targetting: Revisi Target Jangka Menengah dan Panjang Indonesia merupakan satu-satunya negara di ASEAN yang mengalami konsistensi kenaikan skor dalam lima tahun terakhir. Kenaikan skor CPI membuat posisi Indonesia semakin mendekati rerata regional ASEAN sebesar (41). Dengan kombinasi strategi pemberantasan korupsi birokrasi dan grand corruption yang melibatkan pihak swasta bukan tidak mungkin dalam 5 atau 10 tahun lagi posisi Indonesia telah di atas rerata skor grup elite di G20.

Pentingnya Aksi Kolaboratif (Collaborative Action) untuk Memberantas Korupsi Risiko korupsi dapat datang melalui dua arah, dari sektor publik ataupun dari sektor swasta. Menyikapi hasil CPI 2016 ini, Transparency International Indonesia (TII) menyampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

- Pemerintah dan Pemerintah Daerah – Tetap fokus dan perkuat reformasi penegakan hukum dan peningkatan integritas sektor publik.

rata 1 poin setiap tahun. Strategi pemberantasan korupsi nasional masih belum memberikan porsi besar terhadap korupsi politik, korupsi hukum, dan korupsi bisnis." imbuh Dadang Trisasongko, Sekretaris Jenderal, Transparency International Indonesia.

"Dalam konteks peningkatan daya saing dan kemudahan berusaha, fokus pada korupsi birokrasi memang penting tapi bukan satu-satunya strategi percepatan pemberantasan korupsi nasional. Korupsi birokrasi erat kaitannya dengan korupsi politik, korupsi hukum, dan korupsi bisnis. Praktik korupsi birokrasi hanya gejala (symptom) atas praktik korupsi korupsi politik, korupsi hukum, dan korupsi bisnis yang lebih besar (grand corruption)." kata Natalia Soebagjo, Chair of Executive Board, Transparency International Indonesia.

Natalia Soebagjo menekankan kasus Panama Papers meningkatkan kesadaran publik atas penyalahgunaan perusahaan cangkang untuk menyamarkan korupsi, pencucian uang, dan kejahatan lintas negara. Panama Papers meningkatkan tuntutan publik agar perusahaan serius mengimplementasikan program antikorupsi, transparan dalam kepemilikan dan struktur perusahaan, dan transparan dalam pelaporan keuangan perusahaan khususnya dalam kaitan transaksi lintas negara. Ketiga tuntutan itu harus dimasukkan dalam agenda pemberantasan korupsi nasional agar skor CPI bisa meningkat

tajam. Sementara itu pada konteks nasional munculnya inisiatif dan target pada program Tax Amnesty diharapkan mampu memberikan kontribusi positif pada nilai-nilai antikorupsi, bukan hanya pada sektor penerimaan negara.

Rerata Skor Global Stagnan "Di tahun 2016, rerata skor CPI global tertahan di skor 43. Dari 176 negara yang dinilai sebanyak 60% negara (105 dari 176) memiliki skor di bawah rerata dunia atau teraup selisih 3% dibandingkan tahun 2015. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 3% dari negara dunia yang telah melampaui skor rerata CPI global." papar Lia Toriana, Deputi Sekretaris Jenderal, Transparency International Indonesia. Terdapat lima (5) negara yang memiliki skor tertinggi. Negara-negara tersebut adalah Denmark (Skor 90/ Peringkat 1), Selandia Baru (90/1), Finlandia (Skor 89/ Peringkat 3), Swedia (88/4), dan Switzerland (86/5). Negara dengan skor terendah terdapat 7 negara yaitu; Yaman, Sudan, dan Libya (14/170), Suriah (13/173), Korea Utara (12/174), Sudan Selatan (11/175), dan Somalia (10/176).

Skor Rerata Region Asia Pasifik dan Region Amerika Tertinggi Kedua Di tingkat regional, Uni Eropa dan Eropa Barat masih menempati region yang bersih dengan rerata skor 66 (turun), diikuti rerata skor Region Asia Pasifik dan Region Amerika dengan capaian rerata skor 44 (naik). Rerata Asia Pasifik sedikit lebih unggul dibandingkan dengan Timur Tengah dan Afrika Utara dengan skor 38 (turun), Subsahara Afrika

- Tim Saber Pungli harus bergerak lebih agresif dan masif untuk memerkuat momentum pemberantasan korupsi dan mendorong partisipasi masyarakat yang lebih luas lagi.
- Optimisme publik yang telah mulai terbangun agar dipertahankan dan terus ditingkatkan dengan meningkatkan penindakan kasus-kasus korupsi secara adil.
- Segera menerbitkan perangkat hukum yang memastikan swasta mengembangkan dan menerapkan sistem integritas bisnis.
- Perlunya pembenahan sektor publik dalam hal pengadaan barang dan jasa, termasuk misalnya pengadaan alutsista di Kementerian Pertahanan/ TNI.
- Pemerintah dan Pemerintah daerah harus bersinergi dalam melawan “desentralisasi korupsi”
- KPK, Polri, Kejaksaan dan Mahkamah Agung
- Menjadikan KPK sebagai focal point untuk mendorong program antikorupsi sektor

- swasta
- Lembaga-lembaga penegak hukum perlu segera mendayagunakan Peraturan Mahkamah Agung RI tentang Tanggung Jawab Pidana Korporasi sebagai instrumen hukum untuk meningkatkan risiko korupsi bagi kalangan swasta.
  - Swasta
  - Mengembangkan aturan internal dan budaya antikorupsi yang memastikan perusahaan menerapkan sistem integritas bisnis untuk mengurangi risiko korupsi.
  - Mengembangkan sistem pelaporan program antikorupsi secara lebih komprehensif dan menggunakannya sebagai kriteria penentu untuk investasi.
  - Mendorong terbitnya standar audit untuk menilai program antikorupsi dan meningkatkan kualitas penilaian risiko korupsi.
  - Masyarakat Sipil
  - Mendorong perusahaan untuk transparan terhadap program kepatuhan terhadap UU Antikorupsi.

- Melakukan pengawasan independen untuk mendorong praktik bisnis berintegritas dan pengawasan peradilan Tipikor sektor swasta.
- Mendorong penguatan legislasi untuk mendorong integritas sektor swasta, contohnya mengawasi proses revisi UU Tipikor.
- Melakukan monitoring dan analisis program antikorupsi untuk menguatkan kepatuhan terhadap UU Antikorupsi Nasional dan Global.
- Mendorong standar pelaporan country by country untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik.
- Memanfaatkan inisiatif-inisiatif seperti Lapo! dan Saber Pungli untuk masyarakat berpartisipasi dan terlibat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

**Nara Hubung:**  
 Lia Toriana 0812 8027 5652  
 Wahyudi Thohary 0815 7992 747



## MULTI STAKEHOLDER FORUM KELISTRIKAN

# “MEMPERKUAT TATA KELOLA LISTRIK NASIONAL”

Energi listrik merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi pengembangan pembangunan suatu bangsa. Kecenderungan pada saat ini, peningkatan kebutuhan energi listrik tidak seiring dengan peningkatan penyediaan energi listrik, dimana kapasitas daya terpasang masih tetap, sementara kebutuhan masyarakat terus meningkat seiring dengan peningkatan pembangunan dan meningkatnya jumlah penduduk dan kegiatan pendukungnya.

Menyikapi hal tersebut, Transparency International Indonesia menggelar pertemuan multi stakeholder forum bertajuk “**Memperkuat Tata Kelola Listrik Nasional**” di Gedung KPK, Jakarta, pada Kamis (26/1). Hadir dalam pertemuan tersebut Sekjen TII Dadang

Trisasongko, empat Pimpinan KPK, diantaranya Laode M. Syarief, Alexander Marwata, Basaria Panjaitan, Saut Situmorang. Selain itu hadir pula Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jarman, dan Dirut PLN Sofian Basyir.

Dalam pertemuan tersebut dibahas beberapa hal tata kelola listrik nasional dengan mensinergikan program dan kegiatan berbagai stakeholder, sebagai contoh integrasi berbagai regulasi dan kebijakan Pemerintah terkait ketenagalistrikan, di sisi lain isu pembenahan inefisiensi operasionalisasi internal PLN serta pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pengadaan strategis yang bebas *fraud* dan korupsi.



Koordinator Program Economic Governance TI Indonesia Wahyudi Thohari mengatakan, inisiatif Transparansi Sektor Ketenagalistrikan penting diterapkan untuk memastikan proyek 35000MW dilakukan dengan tata kelola yang baik dan antikorupsi. Dengan begitu, Indonesia terhindar dari krisis listrik berkepanjangan.



Inisiatif Transparansi Sektor Ketenagalistrikan adalah usulan transparency international indonesia untuk memperkuat tata kelola yang baik dan antikorupsi dalam penyediaan listrik nasional. Inisiatif ini berisikan rekomendasi aksi yang perlu dilakukan untuk meminimalisasi risiko korupsi dalam proyek

35,000 agar Indonesia terhindar dari krisis listrik melalui penurunan jumlah pemadaman bergilir, peningkatan efisiensi biaya produksi listrik. Implementasi aksi tersebut perlu dilakukan secara bersama melalui pembentukan dan pemantauan oleh forum stakeholder yang terdiri dari pemerintah, swasta dan masyarakat sipil.



## NGOPI (NGOBROL PINTAR)

# “RIBUT PILKADA DI SOSIAL MEDIA”

Dibalik riuhnya tren ekonomi-digital dan gejala millenials yang gemar menjadi relawan, kondisi anak muda DKI Jakarta masih dihadapkan pada banyak masalah. Alih-alih dipandang sebagai mitra strategis, anak muda kerap kali hanya ditempatkan sebagai objek pembangunan dan “angka-angka potensial” setiap kali menjelang Pemilu, termasuk di Pilkada DKI Jakarta tahun ini.

“Hal ini didasarkan fakta bahwa 28,9% dari 7 juta pemilih terdaftar di DKI Jakarta berusia 16-30 tahun, dimana 10,7%-nya adalah pemilih pemula,” papar Usep Hasan dari Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dalam acara ngobrol pintar (NGOPI) dengan tema “RIBUT Pilkada di Social Media”, Jumat (10/2) di Warunk Upnormal Tebet, Jakarta Selatan. Menurutnya, walaupun jumlah tersebut kecil dibandingkan kelompok umur lainnya, dengan proporsi tersebut kelompok anak muda dapat menjadi signifikan karena masih banyak diantara mereka yang merupakan swing voters atau belum menentukan pilihan.

Sementara itu Program Officer Youth Transparency International Indonesia William Umbh mengatakan, perilaku pemilih muda di DKI Jakarta sendiri juga cenderung dinamis. Berdasarkan hasil survei “Persepsi Pemilih Pemula pada Pemerintah, Korupsi dan Pemilu Nasional 2014” yang dilakukan di DKI Jakarta, secara umum tidak ada faktor dominan yang memengaruhi anak muda dalam menentukan pilihan menjelang pemilu. “Namun begitu, berita positif atau negatif yang berkaitan dengan pemilu, partai politik atau tokoh politik paling banyak dipilih sebagai faktor yang dapat mempengaruhi keputusan memilih anak muda,” tutur William.



Melalui diskusi NGOPI ini, anak muda diajak cermat menggunakan informasi di media sosial sebagai salah satu referensi untuk mengetahui track record dan program kerja para pasangan calon serta memperkuat posisi anak muda dengan pemahaman kepemiluan beserta dinamika politiknya.

Diskusi ini digagas oleh KPUD DKI Jakarta bersama Perludem, Transparency International Indonesia, Rumah Pemilu, YouthProactive, Pamflet, Kemudi dan Voteyuk.id. [AN]

## MEDIA BRIEFING

# “MENGENDALIKAN RISIKO KORUPSI DI KEMENHAN/TNI”



*"Ini adalah reformasi gelombang kedua yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam bidang pertahanan, setelah sebelumnya berhasil meletakkan TNI di bawah kontrol sipil dan memisahkan Polri dari TNI."-Dadang Trisasongko, Sekjen TI Indonesia*

Kisruh pengadaan Helikopter WA 101 dinilai mencerminkan tingginya risiko pemborosan dan korupsi di sektor pertahanan maupun militer. Tertutupnya suatu lembaga pemerintahan berpotensi memiliki risiko korupsi yang tinggi.

Sekretaris Jenderal Transparency Internasional Indonesia (TII) Dadang Trisasongko menuturkan lembaga yang tertutup seperti TNI biasanya mempunyai risiko korupsi yang tinggi. Studi yang dilakukan TII tentang Indeks Risiko Korupsi Sektor Pertahanan dan Keamanan menunjukkan hal itu.

Di dalam indeks tersebut, ada enam kategori risiko korupsi : sangat rendah (Band A), rendah (Band B), moderat (Band C), tinggi (Band D), sangat tinggi (Band E) dan kritis (Band F). Pada kurun 2013-2015, indeks risiko korupsi TNI membaik dari kategori E ke D.

"Indeks itu dibangun dari penilaian lima aspek, risiko politik, risiko keuangan, risiko personal, risiko operasional, dan risiko pengadaan barang dan jasa," ujar dia dalam keterangan pers yang diterima, Kamis (9/2).

Dadang melanjutkan, ada beberapa faktor yang menyebabkan tingginya risiko korupsi di tubuh Kemenhan maupun TNI saat ini. Pertama, lemahnya kontrol politik dari parlemen maupun kontrol publik dari masyarakat terhadap institusi militer.

Kedua, lemahnya kontrol dan pengawasan internal di lingkungan Kemenhan maupun TNI. Ketiga, kurangnya partisipasi publik dalam proses legislasi, kebijakan dan penganggaran sektor pertahanan dan keamanan.

Keempat, kurangnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran belanja Kemenhan maupun TNI. Kelima, kurangnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa di Kemenhan maupun TNI.

Keenam, adanya dualisme sistem peradilan dalam menangani tindak pidana korupsi yang dilakukan prajurit TNI. Pengendalian risiko korupsi, sebagai bagian dari pembenahan tata kelola di Kemenhan/TNI sangat mendesak dilakukan.

"Ini adalah reformasi gelombang kedua yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam bidang pertahanan, setelah sebelumnya berhasil meletakkan TNI di bawah kontrol sipil dan memisahkan Polri dari TNI," kata dia.

Penurunan risiko korupsi ini krusial untuk meningkatkan kemampuan Kemenhan maupun TNI dalam menjaga kedaulatan negara, menjamin keamanan warga, menjaga keselamatan prajurit TNI, dan meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI dan keluarganya. "Salah satu indikator kesejahteraan prajurit TNI adalah ketersediaan hunian yang layak," ujar dia.

Saat ini, lanjut dia, diperkirakan lebih 200 ribu atau 52 persen prajurit TNI belum mempunyai rumah sendiri. Sungguh ironis dan patut disesalkan, korupsi pengadaan alutsista yang dilakukan Brigjen TNI Teddy Hernayadi terjadi pada saat ratusan ribu prajurit TNI belum memiliki rumah sendiri.

Karena itu, Dadang mengatakan, perlu ada upaya meningkatkan fungsi kontrol politik parlemen terhadap kebijakan dan perilaku institusi militer dalam mengelola sumberdaya dan tata kelolanya. Anggota DPR, khususnya anggota Komisi I DPR, selain harus meningkatkan pengetahuan dan kompetensinya tentang pertahanan dan keamanan, industri serta perdagangan alutsista.

Selain itu, juga perlu mendorong dan memperdalam keterlibatan dan kontrol publik dalam proses legislasi, kebijakan dan penganggaran sektor pertahanan dan keamanan. Organisasi masyarakat sipil harus mempunyai kapasitas dan kompetensi yang cukup untuk terlibat dalam proses-proses tersebut. Demikian juga institusi media dan asosiasi jurnalisnya.

Sumber: Republika

<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/02/09/040z2326-tii-perlu-ada-pengendalian-risiko-korupsi-di-kemenhan-dantni>

## Opini

# EKONOMI POLITIK PENGADAAN

OLEH REZA SYAWAWI

Laporan tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi tahun 2016 mengungkap bahwa modus korupsi yang paling banyak ditangani meliputi tindak pidana korupsi terkait suap-menyuap, pengadaan barang dan jasa, serta pencucian uang.

Sudah jamak diketahui publik, pengadaan barang dan jasa masih jadi sektor paling rawan terjadinya korupsi. Bahkan, dalam banyak kasus suap-menyuap selalu beririsan dengan kepentingan untuk mendapatkan proyek-proyek yang dibiayai oleh negara.

Pada satu sisi, pengadaan barang dan jasa (PBJ) adalah bagian dari kebutuhan untuk memberikan pelayanan kepada publik. Di sisi lain, ada potensi kerugian begitu besar jika terjadi penyimpangan. Hal ini semakin mengkhawatirkan ketika sistem PBJ tidak selalu mampu memitigasi terjadinya korupsi.

Masalah ini patut jadi catatan penting bagi rezim Joko Widodo- Jusuf Kalla (Jokowi-Kalla) mengingat program pembangunan infrastruktur yang dicanangkan menggelontorkan dana tidak sedikit, bahkan ada yang dibiayai dari utang. Sementara sistem pengawasan terhadap megaprojek ini hanya disandarkan pada pengawasan konvensional yang selama ini ada.

Di tingkat regulasi, proses PBJ memang mengalami banyak perubahan. Seperti

perubahan kelembagaan pengadaan melalui pembentukan unit layanan pengadaan (ULP) di setiap unit hingga penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seperti inovasi layanan pengadaan secara elektronik (LPSE), e-catalogue, dan seterusnya. Bahkan, untuk menyokong perubahan tersebut juga didukung oleh pra-kondisi sebelum pengadaan dilakukan, seperti kewajiban memublikasikan anggaran (APBN/APBD) secara keseluruhan, khususnya publikasi terkait rencana umum pengadaan (RUP) pada setiap unit tertentu.

Pembaruan di sektor PBJ pada akhirnya hanya menyelesaikan persoalan administratif. Sistem hanya membuat pejabat pengadaan tidak bertemu dengan perusahaan tertentu karena semua sudah menggunakan instrumen teknologi informasi.

Informasi mengenai anggaran dan rencana pengadaan sudah tersedia di laman tertentu, tetapi tingkat aksesibilitas publik terhadap informasi masih dipertanyakan. Apakah informasi tersebut terjangkau bagi publik untuk mengaksesnya? Apakah informasi tersebut cukup bagi publik untuk dapat mengawasi pelaksanaan PBJ? Apakah pemerintah telah menyediakan mekanisme pengelolaan pengaduan yang efektif bagi publik?

Pertanyaan ini ditujukan untuk mengukur sejauh mana peran publik dapat digunakan dalam mengawasi pembangunan infrastruktur. Sebab, sistem pengadaan dirasa tidak cukup untuk mengurangi potensi terjadinya praktik korupsi.

Pertama, tak ada standar baku mengenai keterbukaan informasi di sektor pengadaan. Salah satunya mengenai keterbukaan kontrak antara badan publik dan pihak ketiga (perusahaan pemenang). Dalam praktiknya, badan publik masih menilai bahwa kontrak adalah bagian dari informasi yang bersifat rahasia sehingga tidak

dipublikasi. Padahal, jika merujuk UU No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi No 1/2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, perjanjian badan publik dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya adalah informasi yang wajib dibuka kepada publik.

Regulasi pengadaan tak secara eksplisit menyebutkan mengenai keterbukaan kontrak tersebut bagi publik. Padahal, dokumen kontrak menjelaskan dengan rinci siapa yang mengerjakan suatu proyek beserta detail pekerjaan yang akan dilakukan. Keterbukaan kontrak akan jadi dokumen awal untuk memetakan dimensi ekonomi politik pengadaan di seluruh badan publik. Artinya, akan muncul satu analisis baru tentang kecenderungan korporasi tertentu yang memenangkan pekerjaan tertentu. Hal yang tidak mungkin bisa diidentifikasi oleh sistem pengadaan yang selama ini digunakan.

Kedua, pengawasan publik terhadap aktivitas pengadaan yang minim. Problemanya bisa karena pemerintah tak menyediakan mekanisme pengaduan yang jelas dan efektif atau publik tidak cukup memiliki informasi untuk melakukan pengawasan. Oleh karena itu, pemerintah perlu merumuskan satu bentuk mekanisme pengawasan yang terintegrasi terhadap proyek-proyek strategis dengan melibatkan komponen masyarakat sipil.

Kedua hal ini perlu jadi perhatian serius agar tujuan pemerintah untuk menggenjot perekonomian melalui pengadaan infrastruktur tertentu tidak justru jadi bumerang di kemudian hari. Sebab, dalam banyak kasus korupsi, agenda politik untuk mengeruk keuntungan ekonomi selalu berujung pada kegagalan.

*Reza Syawawi, Peneliti hukum dan kebijakan Transparency International Indonesia*



Keterangan Foto:

1. Rapat kerja Transparency International Indonesia, 1-3 Februari 2017, Jimmer Resort, Bogor
2. Audiensi *Local Integrity System* (LIS) dengan Walikota Bandung Ridwal Kamil
3. Audiensi *Local Integrity System* (LIS) dengan Walikota Semarang
4. Sekjen TII Dadang Trisasongko memberikan materi pada Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Pemerintah Kota Makassar

Penanggungjawab: Dadang Trisasongko. Redaktur: Agus Sarwono, Nur Fajrin. Dikelola oleh Tim Advokasi dan Kampanye Transparency International Indonesia.

e-Newsletter TRANSPARANSI diterbitkan oleh Transparency International Indonesia.

JL. Amil Raya No. 5, RT. 01 RW. 04, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta 12510

Phone: 021-2279 2806, 021-2279 2807 Email : info@ti.or.id Telp: 021 7208515 Fax 7267815 Email: info@ti.or.id